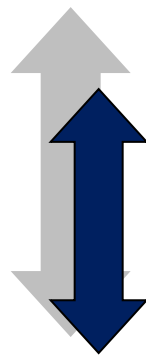




PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

**RENCANA KERJA
(RENJA)**

TAHUN 2023



**DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN JEPARA
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, karunia dan bimbingan Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2023. Kami sadar bahwa Renja ini sebagai dokumen dari Perangkat Daerah (PD) yang memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023-2026.

Dalam penyusunan dokumen Renja ini kami berharap agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan sebagaimana program dan kegiatan yang tertuang didalamnya, sehingga akan dapat terukur target kinerja program kegiatan pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Renja ini, kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan Renja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi niat baik kita semua khususnya dalam melaksanakan tugas dibidang penanganan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Jepara, Amiin.

Jepara,
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN JEPARA



SAMIADJI, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP.19690509 199102 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penyusunan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN 2021	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	49
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi...	49
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	50
3.3. Program dan Kegiatan.....	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	72
BAB V PENUTUP	73
5.1. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian..	73
5.2. Kaidah Pelaksanaan	73
5.3. Rencana Tindak Lanjut	74
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Jepara dan Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

Proses penyusunan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2023 didasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM , Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan

Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Berebes-Tegal-Pemalang;

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peratutran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
31. Peraturan Bupati Jepara Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara;
32. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 ;
33. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 -2026;
34. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ;
35. Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 050.1.3/4246 Tanggal 11 November 2021 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023.

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Sebagai penjabaran dari Renstra Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

B. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu dalam :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara;
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan setiap tahun anggaran pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, proses penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, keterkaitan antara Renja dinas dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan RKPD Kabupaten serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang PD, kewenangan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.4. Sistematika Penulisan

Cukup jelas

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun lalu (n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (n-1) dan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah terhadap capaian program nasional.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan mulai dari Desa, Kecamatan, dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional terkait dengan tugas pokok Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

3.3 Program dan Kegiatan

Memuat faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tabel rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun rencana dan prakiraan maju tahun (n+1)

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

\

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD

Berdasarkan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2021, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mendukung pencapaian Misi ke-3 “Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri” dengan arah kebijakan **“Penguatan industri Kreatif berbasis potensi unggulan serta pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang memperhatikan kelestarian lingkungan”**.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara pada tahun 2021 melaksanakan 11 program yang terdiri dari 24 kegiatan dan 47 sub kegiatan.

- 2.1.1
- Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) program dan 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Keempat Program tersebut yaitu:
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Hubungan Industrial;
 - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
 - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

NO	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)
1	Program Pelatihan Kerja dan produktifitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang siap kerja	%	2,9	1,87	64
		Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri	%	3,2	2,64	83
2	Program Hubungan Industrial	Persentase pekerja/buruh yang	%	57	63,70	112

		menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan				
		Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100	76,9	76,9
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase OVOP yang berkembang	%	2,30	1,88	81,74
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah transmigrasi umum	KK	5	0	0

Sedangkan kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Terdapat 2 (dua) program yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Perencanaan Tenaga Kerja dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dengan realisasi tingkat capaian 100 %.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Ada 5 (lima) program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:

- a. Program Penempatan Tenaga Kerja
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- e. Program Pengembangan UMKM

NO	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)
1	Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,90	69,55	101
		AKAD	orang	14	29	207
		AKAN	orang	235	57	24
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang memiliki diversifikasi usaha	%	84,69	86,23	101,82

3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki NIK	%	59,96	100	167
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang berkembang kearah mandiri	%	1,11	1,53	139,10
5	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	0,12	0,32	266,67
		Persentase UMKM yang berdaya saing	%	2,96	3,40	114,86

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja/program

➤ Faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya target kinerja antara lain:

1. Pencari kerja yang mendaftar melalui AK-1 hanya yang bekerja di sektor formal yang mensyaratkan, sehingga banyak pekerja sektor informal tidak mendaftarkan kartu AK-1
2. Pelatihan di UPT BLK yang dibiayai dari dana DBHCHT tidak dapat dilaksanakan karena kriteria peserta sesuai PMK Nomor 206/PMK.07/2020 dan pendaftar tidak memenuhi kuota kelas pelatihan;
3. Penempatan CPMI Ke Luar Negeri masih sedikit dikarenakan beberapa negara tujuan belum di buka;
4. Sebagian perusahaan yang ada di Jepara adalah status cabang dan PP didaftarkan oleh perusahaan pusat;
5. Kurangnya pemahaman kelompok usaha mikro kecil yang mempunyai usaha sejenis untuk berkembang dan bergabung menjadi badan hukum koperasi;
6. Tidak adanya pemberangkatan transmigran karena masih adanya pandemi covid-19.

➤ Faktor-faktor yang menjadi pendukung terpenuhinya atau melebihi target kinerja antara lain:

1. Adanya alokasi anggaran refocusing Covid-19 pada tahun 2020 yang mendukung pencapaian target program tahun 2021;
2. Pembuatan AK-1 secara online sehingga pelayanan tetap dapat dilaksanakan;

3. Adanya alokasi anggaran yang bersumber dari DAK NON FISIK sehingga mendukung capaian target urusan koperasi dan usaha kecil menengah;
4. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra PD

Dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat berimplikasi pada tidak tercapainya target program dan kegiatan sehingga target-target program yang belum tercapai tersebut perlu perhatian khusus dan diambil kebijakan agar target tersebut dapat tercapai sesuai dengan Perubahan Renstra Diskopukmnakertrans 2017-2022.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. Menetapkan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja;
2. Mengusulkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja;
3. Meningkatkan anggaran kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya target kinerja;
4. Mengusulkan tambahan anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel II.3

Tabel II.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan
Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi s/d Tahun 2022
Kabupaten Jepara

Nama OPD : Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2017-2022)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan tahun lalu(2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja dan Transmigra si tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja dan Transmigrasi S/D tahun berjalan	
								Target Renja Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun (2021)	Realisasi Renja Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja dan Transmigra si tahun (2021)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10/4)
1	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase UKM yang berdayasaing								
					Persentase OVOP yang berkembang								
			01	Pelatihan Keterampilan dan Pengembangan Desain Produk UMKM	Jumlah pelaku usaha yang inovatif, kreatif dan profesional	460	100	25	25	100%		125	34,78%
			02	Identifikasi dan validasi data UMKM	Jumlah UMKM teridentifikasi dan tervalidasi	4.000 UMKM	1.938	500	500	100 %		2.438	60,95%
			03	Penataan kelembagaan dan pengembangan manajemen pengelolaan UMKM	meningkatnya kualitas struktur kelembagaan UMKM	75	75	0	0	0	0	75	100%
			04	Pelatihan Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil	Jumlah kelompok UMKM yang tertata kelembagaannya	20	20	0	0	0	0	20	100%

			05	Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM melalui Peningkatan Kewirausahaan	Jumlah UKM yang inovatif dan berdaya saing	480	140	1.117	1.117	100%	0	1257	261,88%
				Pelatihan Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil (MUK) dan Manajemen Keuangan bagi UMKM	Jumlah UMKM mandiri secara managerial	300	50	0	0	0	0	50	16,67 %
1	15	17		Prog. Pengembangan sistem pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM yang berkembang kearah mandiri								
					Persentase UMKM yang mandiri Pembiayaan dan Pemasaran								
			01	Fasilitasi Pameran Produk UMKM	Jumlah pelaku UKM peserta pameran	24	10	1	1	100%	0	13	45,83 %
			02	Pelatihan Kemasan (packaging)	Jumlah pelaku usaha yang menerapkan kemasan modern	520 UMKM	190	0	0	100%	0	190	36,54 %
			03	Pelatihan Pemasaran melalui E Commerce bagi pelaku usaha kecil	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan pemasaran online	150 UMKM	105	105	105	100%	0	210	200,00 %
			04	Fasilitasi sertifikasi halal	Jumlah UMKM bersertifikat halal	230 UMKM	58	10	10	100%	0	68	29,56 %
			05	Sosialisasi dan evaluasi IUMK	Jumlah UMKM dan aparat desa yang mendapatkan sosialisasi	3.306 UMKM	896	50	50	100%	0	946	28,61 %
				Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM melalui Peningkatan Keterampilan usaha	Jumlah UKM yang inovatif dan berdaya saing	80	120	0	0	0 %	0	120	150 %
				TemuKemitraan dan JaringanBisnis UMKM denganPengusaha	Jumlah Kerjasama pelaku UMKM dan Pasar Modern	40	120	0	0	0 %	0	120	300 %
				PelatihanKewirausahaanManajemen Usaha Kecil (MUK) dan ManajemenKeuanganbagi UMKM	Jumlah pelaku UMKM professional secara manajerial	50	100	0	0	0 %	0	100	200 %

				Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	0,09							
				Temu Kemitraan dan Jaringan Bisnis UMKM dengan Pengusaha	Jumlah Kerjasama pelaku UMKM dan Pasar Modern	240 umkm	120	80	80	100 %	0	200	83,33 %
1	15	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif								
					Persentase Koperasi yang telah mendapatkan Nomor Induk Koperasi								
					Persentase Koperasi yang memiliki Diversifikasi Usaha								
				Peningkatan kualitas organisasi badan hukum & perubahan anggaran dasar	Jumlah Koperasi yang berbadan Hukum	75	125	0	0	0	0	125	166,67%
				Peningkatan kualitas organisasi badan hukum & perubahan anggaran dasar	Jumlah Koperasi yang berbadan Hukum	75	125	0	0	0	0	125	166,67%
				Pendampingan Pengembangan usaha Koperasi Pertanian	Jumlah koperasi pertanian yang berkualitas	40	80	0	0	0	0	80	200%
				Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan berbasis koperasi	Jumlah koperasi yang sehat/aktif	250	300	0	0	0	0	300	120 %
				Pelatihan Akuntansi dan Uji Kompetensi bagi pengurus koperasi	Jumlah SDM pengurus yang mengikuti uji kompetensi	40	55	0	0	0	0	55	137,5 %
			05	Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Managemen melalui identifikasi koperasi	Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat/aktif	150	150	0	0	0	0	150	100 %
			06	Perkuatan jaringan kelembagaan dan usaha sentra kulakan koperasi (Senkuko)	Meningkatnya Kualitas kelembagaan koperasi	20	20	0	0	0	0	20	100%
			07	Sistem Informasi Koperasi	Jumlah koperasi yang dikembangkan melalui SIMKORA	100	150	0	0	0	0	150	150 %
			08	Pelatihan Pengembangan Produk Unggulan Usaha Koperasi dan Diklat Pajak Koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	50	50	0	0	0	0	50	100 %
			09	Monitoring dan evaluasi bantuan koperasi melalui perkuatan jaringan kelembagaan dan struktur pembiayaan KSP /USP	JumlahKoperasi yang dimonitoring	40 ksp / usp	60	0	0	0	0	60 kop	150 %

				yang bersumber dari APBN/APBD I									
			10	Advokasi dan Pengawasan Koperasi	Jumlahkoperasi yang sehat/aktif	125	125	0	0	0	0	125	100 %
				Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Melalui Identifikasi Koperasi	Meningkatnyajumlahkoperasi yang sehat/aktif	75	75	0	0	0	0	75	100%
				Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektifitass Pembiayaan	Persentase Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha								
				Monitoring dan evaluasi koperasi melalui perkuatan jaringan kelembagaan dan struktur pembiayaan KSP/USP yang bersumber dari APBN/APBD I	Jumlah koperasi yang dimonitoring	60	25	30	30	100%	0	55	91,66 %
				Perkuatan jaringan kelembagaan dan usaha koperasi	Jumlah koperasi yang diberikan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usaha	85	20	30	30	100 %	0	50	58,82 %
				Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber daya Lokal	Persentase OVOP yang berkembang								
				Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal melalui sentra kulakan toko/senkuko	Jumlah koperasi/outlet yang mempunyai standar harga yang sama	40	0	15	15	100%	0	15	37,50 %
				Pendampingan pengembangan produk unggulan berbasis Koperasi	Jumlah koperasi yang mengembangkan kualitas produk OVOP	51	14	25	25	100 %	0	39	76,47
				Program Penguasaan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Telah Mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK)								
				Pendampingan pengembangan usaha koperasi pertanian	Jumlah koperasi pertanian yang berkualitas	85	20	25	25	100%	0	45	52,94 %
				Sistem Informasi Koperasi	Jumlah koperasi yang dikembangkan melalui SIMKORA	200	30	35	35	100 %	0	65	32,50 %

				Peningkatan kualitas organisasi badan hukum dan perubahan anggaran dasar	Jumlah koperasi yang ber Badan Hukum dan yang mengajukan PAD	115	25	35	35	100%	0	60	52,17 %
				Penataan kelembagaan dan pengembangan manajemen melalui identifikasi koperasi	Jumlah koperasi yang sehat	150	25	35	35	100 %	0	60	40,00 %
				Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Persentase Koperasi Aktif								
				Pelatihan akuntansi dan uji kompetensi bagi pengurus koperasi	Meningkatnya kualitas SDM pengurus yang mengikuti uji kompetensi	55	0	0	0	0 %	0	0	0 %
				Pelatihan akuntansi dan uji kompetensi bagi pengelola koperasi	Jumlah SDM pengelola yang mengikuti uji kompetensi	65	50	25	25	100 %	0	75	115,38 %
				Pengembangan Ketrampilan SDM dan Pengurus dan Pengawas	Jumlah SDM pengurus dan pengawas koperasi yang mengikuti pengembangan ketrampilan	115	0	0	0	0	0	0	0 %
				Advokasi dan pengawasan koperas	Jumlah koperasi yang sehat dan mandiri	115	75	75	75	100 %	0	150	130,43
				Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi	Jumlah pelatihan, uji kompetensi	300	150	0	0	0	0	150	50,00 %
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Kerja	Persentase tenaga kerja yang siap kerja								
					Besaran Tenaga kerja yang membuka usaha mandiri								
				Bimbingan Tehnis Penyusunan Skala Upah dan Menunjang Kegiatan Dewan Pengupah	Jumlah perusahaan yang menyusun struktur dan skala upah	60	90	0	0	0	0	90	150 %
				Pembinaan dan Pemantauan THR serta Sosialisasi UMK Kabupaten Jepara	Jumlah perusahaan yang memberikan upah sesuai UMK dan memberikan THR sesuai peraturan	120	120	0	0	0	0	120	100 %

				Pemagangan Calon Tenaga Kerja (DBHCHT)	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan sosialisasi pemagangan	440	90	150	150	100 %	0	240	54,55 %
				Pembinaan dan Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah wirausaha baru yang mengikuti pembinaan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	340	180	120	120	100 %	0	300	88,21 %
				Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dalam Bidang Tata boga dan pijatbagilbu rumah tangga dan pencari kerja (DBHCHT)	Jumlah peserta pelatihan tata boga dan pijat mendapatkan pelatihan ketrampilan	60	120	0	0	0 %	0	0	200%
				Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dalam Bidang Tata boga bagilbu rumah tangga dan pencari kerja (DBHCHT)	Jumlah peserta pelatihan tata boga yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	300	160	40	40	100 %	0	200	66,67 %
				Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki ijin	40	40	40	40	100 %	40	40	100 %
				Pembinaan Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri	Jumlah CTKI, PPTKIS dan Aparat Desa yang mendapatkan sosialisasi	800	350	50	50	100 %	0	400	50 %
				Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan AK Online da Bursa Kerja Online Pembuatan Informasi Pasar Kerja	Jumlah paket peralatan dalam menunjang pelayanan AK Online dan Bursa Kerja On Line	6 paket	3	0	0	0 %	0	3	50 %
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Konseling) bagi Pencari Kerja dan Sosialisasi Peluang Kerja dalam dan luar negeri ke Bursa Kerja Khusus di SMK se Kab. Jepara	Jumlah pencari kerja dan lulusan SMK yang mendapatkan Job conseling dan sosialisasipeluangkerja	1.200 orang	650	100	100	100 %	0	750	62,50 %

				Pemberdayaan SP/SB di Perusahaan	Jumlah SP/SB yang meningkatkualitasnya	20	80	0	0	0 %	0	80	400 %
				Bimbingan Teknis Tentang Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Pengusaha dan Pekerja	Jumlah pengusaha dan pekerja yang meningkat pengetahuannya tentang peraturan ketenagakerjaan	60	120	0	0	0 %	0	120	200 %
				Pembinaan dan pemberdayaan LKS Bipartit dan Tripartit	Jumlah LKS Bipartit dan Tripartit di perusahaan	40	40	0	0	0 %	0	40	100%
				Penyelesaian PHI dan PHK	Jumlah penyelesaian kasus PHI dan PHK di perusahaan	15 kasus	30	0	0	0 %	0	30	200 %
				Pembinaan K3 PengujianlingkunganKerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan norma keselamatan dan kesehatan kerja	20	40	0	0	0 %	0	40	200 %
				Pembinaan kemampuan keterampilan kerja masyarakat di bidang kewirausahaan melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM) & pemuda mandiri Profesional (TKPMP)	Jumlah pencari kerja yang menjadi TKM dan TKPMP	240	80	20	20	100 %	0	100	41,67 %
				Pembentukan Koperasi karyawan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang membentuk koperasi karyawan di perusahaan	40	240	0	0	0 %	0	240	600 %
				Pembinaan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) di perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu	30	60	0	0	0 %	0	60	200%

				Pembinaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	Jumlah perusahaan yang ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	40	80	0	0	0 %	0	80	200 %
				Pembinaan dan Pengawasan Inspeksi Tenaga Kerja Asing	Jumlah TKA yang ditempatkan melalui IMTA	100 perusahaan dan 100 orang rekom IMTA	100	0	0	0 %	0	0	100 %
				Fasilitasi Pengawasan dan pengendalian permasalahan TKI di Luar Negeri	Jumlah CTKI yang diterbitkan Rekom ID CTKI	100	100	0	0	0 %	0	100	100 %
				Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT bagi Buruh Rokok Mantan Buruh dan Pencari Kerja (DBHCHT)	Jumlah pencari kerja yang dilatih di UPT BLK	2.400	1.445	192	192	100 %	0	1.637	68,20 %
				Kegiatan Surveillance implementasi ISO 9001, 2015 untuk pelayanan informasi pasar kerja	Jumlah surveillance implementasi ISO 9001, 2015	1 kali	1 kali	0	0	0 %	0	1 kali	100 %
				Peningkatan sarana prasarana pelayanan IMTA	Jumlah aplikasi IMTA yang diupgrade	1 aplikasi	1 paket	0	0	0 %	0	1 paket	200 %
				Pembinaan kemampuan ketrampilan kerja masyarakat melalui pembentukan wira usaha baru bagi TKI purna	Jumlah TKI Purna yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	40	40	0	0	0 %	0	40	100 %
				Pameran Bursa Kerja /Job Fair dan Kelompok Binaan	Jumlah perusahaan dan kelompok binaan yang mengikuti job fair	40 perusahaan dan 20 kelompok binaan	40 perusahaan dan 20 kelompok binaan	0	0	0 %	0	40 perusahaan dan 20 kelompok binaan	100 %

			Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dalam Bidang Penjahitan dan Tata Rias /Salon bagi Ibu Rumah Tangga dan Pencari Kerja (DBHCHT)	Jumlah pencari kerja yang dilatih di LPKS`	720	300	100	100	100 %	0	400	55,56 %
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Jumlah lulusan SMK yang mengikuti sertifikasi kompetensi	100	20	0	0	0 %	0	20	20 %
			Monitoring Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri dan TKI di Luar Negeri melalui Mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Negara (AKAN)	Jumlah peserta pelatihan tata boga dan pijat mendapatkan pelatihan ketrampilan	6 kali	3 kali	1 kali	1 kali	100 %	0	4 kali	66,67 %
			Bursa Kerja Online (BKO) dan Pembuatan Informasi Pasar Kerja (IPK)	Jumlah pencari kerja terdaftar	84.000 pencari	80.336	20.000	14.137	70,69 %	0	94.437	112,47 %
			Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dalam bidang Terapan Teknologi Tepat Guna bagi pencari kerja (DBHCHT)	Jumlah kelompok pencari kerja yang mendapatkan pelatihan terapan teknologi tepat guna	12 kelompok	0	12	12	100 %	0	12	100 %
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja								
				AKAD (antar kerja antar daerah)								
				AKAN (antar kerja antar negara)								
			Kegiatan Surveillance implementasi ISO 9001, 2015 untuk pelayanan informasi pasar kerja	Jumlah surveillance implementasi ISO 9001,2015	4 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0	2 kali	50 %
			Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan IMTA	Jumlah aplikasi IMTA yang diupgrade	1 aplikasi	1 aplikasi	0	0	0%	0	1	100%

				Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat Melalui Pembentukan Wirausaha Baru bagi TKI Purna	Jumlah TKI Purna yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	200 orang	60 orang	40	40	100%	0	100	50 %
				Pameran Bursa Kerja / Job Fair dan Kelompok Binaan	Jumlah perusahaan dan kelompok binaan yang mengikuti job fair	180 perusahaan dan 90 kelompok binaan	40 perusahaan dan 20 kelompok binaan	20 perusahaan dan 10 kelompok binaan	20 perusahaan dan 10 kelompok binaan	100 %	0	60 perusahaan dan 30 kelompok binaan	33,33 %
				Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dalam bidang Terapan Teknologi Tepat Guna bagi Pencari Kerja	JumlahKelompok Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Terapan Teknologi Tepat Guna	60 kelompok	19	23	23	100 %	0	42	70 %
				Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Perusahaan	Jumlah BKK dan perusahaan yang menyampaikan lowongan kerja	210 BKK, 600 orang dan 240 perusahaan	155 BKK, 340 orang dan 170 perusahaan	50 BKK, 100 orang dan 50 perusahaan	50 BKK, 100 orang dan 50 perusahaan	100 %	0	205 BKK, 350 orang dan 220 perusahaan	97,16 %
				Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Jumlah TKA yang ditempatkan melalui IMTA	400 perusahaan dan 400 orang rekom IMTA	50 perusahaan dan 50 orang rekom IMTA 0	50 perusahaan dan 50 orang rekom IMTA 0	50 perusahaan dan 50 orang rekom IMTA	100 %	0	100 perusahaan dan 100 orang rekom IMTA	25%
				Fasilitasi Pengawasan dan pengendalian permasalahan TKI di Luar Negeri	Jumlah CTKI yang diterbitkan Rekom ID CTKI	400	100	100	100	100 %	0	200	50 %
				Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentasepekerja/buruh yang menjadipeserta program BPJS Ketenagakerjaan								
					Persentaseperselisihanpengusaha-pekerja yang diselesaikan								

				Pembinaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	Jumlah perusahaan yang ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	200	80	50	50	100 %	0	130	65 %
				Pemberdayaan SP/SB di Perusahaan	Jumlah SP / SB di perusahaan yang meningkatkan kualitasnya	210	40	25	25	100%	0	65	30,95 %
				Bimbingan Teknis Tentang Peraturan Ketenagakerjaan bagi Pengusaha dan Pekerja	Jumlah pengusaha dan pekerja yang meningkat pengetahuannya tentang peraturan ketenagakerjaan	300	100	50	50	100%	0	150	50 %
				Pembinaan dan Pemberdayaan LKS Bipartit dan Tripartit	Jumlah LKS Bipartit dan Tripartit di perusahaan	240 perusahaan	80	10	10	100%	0	90	37,5 %
				Penyelesaian Perselisihan PHI dan PHK	Jumlah penyelesaian kasus PHI dan PHK di perusahaan	175 kasus	30	30	30	100%	0	60	34,29 %
				Pembinaan K3 Pengujian Lingkungan Kerja dan Kegiatan Bulan K3	Jumlah perusahaan yang melaksanakan norma kesehatan dan keselamatan kerja	240 perusahaan	65	35	35	100 %	0	100	41,67 %
				Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di perusahaan	190 perusahaan	60	25	25	100 %	0	85	44,74 %
				Bimbingan Tehnis Penyusunan Skala Upah dan Menunjang Kegiatan Dewan Pengupah	Jumlah perusahaan yang menyusun struktur dan skala upah	195 perusahaan	30	25	25	100 %	0	55	28,21 %
				Pembinaan dan Pemantauan THR serta Sosialisasi UMK Kabupaten Jepara	Jumlah perusahaan yang memberikan upah sesuai UMK dan memberikan THR sesuai peraturan	240 perusahaan	30	25	25	100 %	0	55	22,92 %
				Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan								

				Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyebaran penyakit HIV/AIDS di tempat kerja	40 perusahaan	40	40	40	100 %	0	40	100 %
				Pembinaan, Pengawasan dan Inspeksi Tenaga Kerja Asing	Jumlah TKA yang ditempatkan melalui IMTA	100 perusahaan dan 100 orang rekom IMTA	100 perusahaan dan 100 orang rekom IMTA	100 perusahaan dan 100 orang rekom IMTA	100 perusahaan dan 100 orang rekom IMTA	100 %	0	82 perusahaan dan 82 orang rekom IMTA	82 %
				Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Permasalahan TKI di Luar Negeri	Jumlah CTKI yang diterbitkan Rekom ID CTKI	100 orang TKI / CTKI	100 orang TKI / CTKI	100 orang TKI / CTKI	100 orang TKI / CTKI	100 %	0	100 orang TKI / CTKI	100 %
				URUSAN PILIHAN									
				Transmigrasi									
				Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi									
				Penjajagan dan kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi Keluar Jawa	Jumlah KK yang berangkat	36 kk	26	5	0	0 %	0	31	86,11 %
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran								
				Pelayanan Teknis Kantor	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Teknis Kantor	12 bulan	12 bulan	12	12	100 %	12	12	100 %
				Pelayanan Teknis Kantor BLK	Terlaksananya kegiatan pelayanan teknis kantor UPT. BLK	12 bulan	12 bulan	12	12	100 %	12	12	100 %
				Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Serapan Anggaran								
				Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	12	100 %	0	12	100 %

				Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran OPD	Persentase Serapan Anggaran								
				Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Diskopukmnakertrans	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	0 %	12	12	100 %

Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:

- Kolom 4 merupakan kondisi target kinerja dari tahun 2017 sampai dengan 2022.
- Kolom 10 merupakan perkiraan realisasi kinerja di tahun 2022.

Berdasarkan kajian hasil capaian kinerja dan permasalahan – permasalahan yang belum mendukung tercapainya indikator kinerja Renstra Dinas koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, berikut langkah-langkah pemecahan masalahnya :

1. Meningkatkan anggaran kegiatan untuk Pelatihan kader koperasi dari anggota yang aktif , Pengelola, Pengurus dan Pengawas Koperasi guna meningkatkan koperasi yang aktif dan sehat;
2. Meningkatkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung Peningkatan jaringan pemasaran UMKM melalui kegiatan pameran promosi UMKM baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional serta menambah kegiatan Pelatihan pemasaran melalui E-Commerce bagi pelaku usaha kecil sehingga dapat memperluas akses pemasaran produk-produk UMKM melalui media sosial (internet);
3. Mengusulkan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produk UMKM diantaranya kegiatan Pelatihan Kemasan (Packaging) produk UMKM dan Fasilitasi sertifikasi halal bagi produk UMKM;
4. Mengusulkan tambahan anggaran untuk Program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja Peningkatan kualitas SDM pengelola UKM dan Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
5. Meningkatkan anggaran pelatihan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran yang ada di Jepara.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, merupakan dinas pelayanan yang mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Jepara.

Selain indikator kinerja tersebut Pelayanan Publik yang selama ini ada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, meliputi pelayanan – pelayanan sebagai berikut :

1. Proses Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

2. Proses Persyaratan, Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
3. Proses Penilaian Kesehatan KSP/USP;
4. Promosi dan Pameran Produk-produk Koperasi dan UMKM;
5. Pelayanan AK 1 yang cepat;
6. Pelayanan Rekomendasi Tenaga kerja Indonesia yang keluar negeri;
7. Pelayanan Kasus permasalahan Hubungan Industrial antara pekerja dan perusahaan.

Sedang indikator kinerja pelayanan yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, belum bisa terukur dan beberapa kegiatan yang belum ada peraturan yang mengaturnya.

Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
(terlampir)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Jepara**

No	Indikator	SPM/Sta ndar nasional	IKK	IKK Target Renstra Dinas Koperasi, Ukm, Tenagakerja Dan Transmigrasi						Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Persentase koperasi aktif			83,96	84,33	84,70	85,06	45	47	84,98	82,90	45	47	
2	Pelayanan Ak 1 yang cepat			16.900	16.900	16.900	16.900	20.000	20.000	18.473	17.124	20.000	20.000	
3	Rekomendasi Tenaga kerja Indonesia			235	235	235	235	235	235	57	41	235	235	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			68,70	68,80	68,90	69,00	70,10	70,30	69,55	69,55	70,10	70,30	
5	Persentase Perselisihan Pengusaha dan Buruh yang diselesaikan			100	100	100	100	100	100	76,09	100	100	100	

Berdasarkan data pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, tersebut terdapat catatan penting realisasi persentase koperasi aktif pada tahun 2021 sebesar 84,98 persen telah melebihi target Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja begitu juga dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2021 sebesar 69,55 persen melebihi target yang ditetapkan sedangkan untuk Pelayanan AK-1 yang cepat belum bisa memenuhi target dan terealisasi sebanyak 18.473 orang .

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara,.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, mempunyai tugas membantu tugas Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah , tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Jepara, mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
2. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
4. pelaksanaan pembinaan, administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:

- a. Terbatasnya Pengawas Koperasi;
- b. Terbatasnya Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan.

Sedangkan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs ,dampaknya antara lain :

1. Belum tercapainya Target TPT 3,00 persen pada tahun 2021 dimana TPT pada tahun 2021 adalah 4,23 persen.
2. Target Persentase koperasi sehat 87,86 persen tidak dapat tercapai, dimana realisasi pada tahun ini sebesar 75,19 persen.

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah:

1. Masih lemahnya manajemen dan kelembagaan koperasi;
2. Belum adanya kebijakan atau peraturan daerah Kabupaten Jepara yang mengatur tentang izin pendirian cabang koperasi dari daerah lain sehingga menimbulkan persaingan dengan koperasi yang ada di Kabupaten Jepara;
3. Rendahnya struktur permodalan, daya inovasi dan kreatifitas serta etos kerja dan profesionalisme SDM pengelola UMKM;
4. Terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana teknologi informasi, peluang pasar serta kurangnya kemitraan antar UMKM dan antar koperasi;
5. Kompetensi dan kualitas Pencari Kerja tidak sesuai dengan lowongan kerja/persyaratan kerja yang tersedia;
6. Tenaga kerja yang tersedia belum siap digunakan pada perusahaan yang ada.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

1. Tidak tercapainya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021, maka program dan kegiatan prioritas tahun 2023 yang direncanakan antara lain :
 - a. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten.
 - b. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2. Untuk mendukung persentase koperasi sehat maka program/kegiatan yang diprioritaskan pada tahun 2023 adalah Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

- 3. Program Pengembangan UMKM dan Program Pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Mikro (UMKM) untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca covid-19.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Adapun secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk tahun 2023 menurut rancangan awal RKPD adalah Rp. 11.489.104.000,-. Sedangkan menurut hasil analisis kebutuhan adalah sebesar Rp. 12.237.704.000,-termasuk belanja gaji dan tunjangan PNS. Adanya perbedaan penganggaran antara rancangan awal RKPD dan menurut hasil analisis kebutuhan di karenakan adanya tambahan 2 sub kegiatan baru yaitu Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran serta adanya penambahan anggaran pada beberapa subkegiatan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19.

Tabel II.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Jepara
(terlampir)

TABEL II.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN JEPARA

Nama OPD : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Jepara

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
2	0	0			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja yang dilatih	2,7 %		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja yang dilatih	2,7 %	
2	0	0	2		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	376 orang		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	376 orang	
2	0	0	2	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Jepara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (dilatih soft skill untuk usaha mandiri dan	376 orang	1.130.595.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Jepara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (dilatih soft skill untuk usaha mandiri dan usulan	376 orang	1.210.595.000

							usulan aspirasi (bidang Nakertrans) serta pelatihan di UPTD BLK					aspirasi (bidang Nakertrans) serta pelatihan di UPTD BLK		
2	0	0	2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	24 lembaga		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	24 lembaga	
2	0	0	2	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Jepara	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	24 lembaga	15.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Jepara	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	24 lembaga	15.000.000
2	0	0	2		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	48 perizinan		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	48 perizinan	
2	0	0	2	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Jepara	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	48 perizinan	16.000.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Jepara	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	48 perizinan	16.000.000
2	0	0	2		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	4 perusahaan		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	4 perusahaan	
2	0	0	2	0	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Jepara	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	4 perusahaan	20.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Jepara	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	4 perusahaan	20.000.000
2	0	0	2		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah	5 dokumen	
2	0	0	2	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah	5 dokumen	90.000.000

2	0	0			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,28 %		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,28 %	
2	0	0	2		Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD, dan perluasan kesempatan kerja	7.540 orang		Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD, dan perluasan kesempatan kerja	7.540 orang	
2	0	0	2	0	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Jepara	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	60 Orang	14.700.000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Jepara	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	60 Orang	14.700.000
2	0	0	2	0	Pelayanan antar kerja	Kab. Jepara	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	7200 Orang	10.000.000	Pelayanan antar kerja	Kab. Jepara	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	7200 Orang	10.000.000
2	0	0	2	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Jepara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	180 Orang	39.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Jepara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	180 Orang	39.000.000
2	0	0	2	0	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas	Kab. Jepara	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	40 Orang	26.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas	Kab. Jepara	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	40 Orang	26.000.000
2	0	0	2	0	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Jepara	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program	60 Orang	86.060.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Jepara	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program	60 Orang	86.060.000

							Perluasan Kesempatan Kerja						Perluasan Kesempatan Kerja		
2	0 7	0 4	2 0 3		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem <i>Online</i> (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)	20.000 orang		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem <i>Online</i> (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)	20.00 0 orang		
2	0 7	0 4	2 .0 3	0 1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Kab. Jepara	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	20.000 Dokumen	10.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Kab. Jepara	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	20.00 0 Doku men	10.000.000	
2	0 7	0 4	2 0 3	0 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Kab. Jepara	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem <i>Online</i> (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)	20.000 Orang	17.981.500	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Kab. Jepara	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem <i>Online</i> (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)	20.00 0 Orang	17.981.500	
2	0 7	0 4	2 .0 3	0 3	<i>Job Fair</i> /Bursa Kerja	Kab. Jepara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui <i>Job Fair</i> /Bursa Kerja	7.200 Orang	70.000.000	<i>Job Fair</i> /Bursa Kerja	Kab. Jepara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui <i>Job Fair</i> /Bursa Kerja	7.200 Orang	70.000.000	
2	0 7	0 4	2 0 4		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan	260 orang		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan	260 orang		
2	0 7	0 4	2 0 4	0 1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Jepara	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	80 Orang	15.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Jepara	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	80 Orang	15.000.000	
2	0 7	0 4	2 0 4	0 2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Jepara	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	160 Orang	17.000.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Jepara	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	160 Orang	17.000.000	

2	0	0	2	0	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Jepara	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	25.470.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Jepara	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	25.470.000
2	0	0	2		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah TKA yang divalidasi pengesahan RPTKA Perpanjangan dengan lokasi kerja Kabupaten Jepara	94 Orang		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah TKA yang divalidasi pengesahan RPTKA Perpanjangan dengan lokasi kerja Kabupaten Jepara	94 Orang	
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah TKA yang divalidasi pengesahan RPTKA Perpanjangan dengan lokasi kerja Kabupaten Jepara	94 orang	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah TKA yang divalidasi pengesahan RPTKA Perpanjangan dengan lokasi kerja Kabupaten Jepara	94 orang	30.000.000
2	0	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	100 %		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	100 %	
2	0	0	2		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jml Persh yg melaksanakan Pengesahan PP yg terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP Online	75 perusahaan		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jml Persh yg melaksanakan Pengesahan PP yg terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP Online	75 perusahaan	
2	0	0	2	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Jepara	Jumlah Perusahaan yg memiliki PP	75 perusahaan	38.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Jepara	Jumlah Perusahaan yg memiliki PP	75 perusahaan	38.000.000
2	0	0	2	0	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kab. Jepara	Jumlah Perusahaan yg memiliki PKB	5 perusahaan	34.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kab. Jepara	Jumlah Perusahaan yg memiliki PKB	5 perusahaan	34.000.000

2	7	5	2 . 0 1	0 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Jepara	Jml Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, LKS Bipartit) dan Pekerja yg terdaftar sbgai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	135 laporan	60.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Jepara	Jml Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, LKS Bipartit) dan Pekerja yg terdaftar sbgai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	135 laporan	60.000.000
2	0 7	0 5	2 . 0 2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota Kabupaten/Kota		Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan	45 perkara		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota Kabupaten/Kota		Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan	45 perkara	
2	0 7	0 5	2 . 0 2	0 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Perselisihan yang dicegah	15 perkara	27.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Perselisihan yang dicegah	15 perkara	77.000.000
2	0 7	0 5	2 . 0 2	0 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Perkara Perselisihan yg terselesaikan	30 perkara	27.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Perkara Perselisihan yg terselesaikan	30 perkara	27.000.000
2	0 7	0 5	2 . 0 2	0 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Jepara	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yg diverifikasi	56 Asosiasi dan SP/SB	28.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Jepara	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yg diverifikasi	56 Asosiasi dan SP/SB	28.000.000
2	0 7	0 5	2 . 0 2	0 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	2 lembaga	50.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama	Kab. Jepara	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	2 lembaga	100.000.000

										Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				
2	0	0	2	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Jepara	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 orang	11.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Jepara	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 orang	11.000.000
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	
2	1	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	7 dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	7 dokumen	
2	1	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1.000.000

							Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
2	'17	'01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000
2	'17	'01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.000.000
2	'17	'01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000
2	'17	'01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	2 dokumen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	2 dokumen	
2	'17	'01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jepara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	5.093.762.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jepara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	5.093.762.000
2	'17	'01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	137.840.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	137.840.000
2	'17	'01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	8 dokumen		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	8 dokumen	

2	'1 7	'0 1	2 0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Jepara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Jepara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang	30.000.000
2	'1 7	'0 1	2 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	6 dokumen		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	6 dokumen	
2	'1 7	'0 1	2 0 6	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000
2	'1 7	'0 1	2 0 6	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	62.244.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	62.244.000
2	'1 7	'0 1	2 0 6	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jepara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jepara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.000.000
2	'1 7	'0 1	2 0 6	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000
2	'1 7	'0 1	2 0 6	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Jepara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Jepara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.000.000
2	'1 7	'0 1	2 0 6	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	135.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	135.000.000
2	'1 7	'0 1	2 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72 unit		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72 unit	
2	'1 7	'0 1	2 0 7	0	Pengadaan Mebel	Kab. Jepara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46 Unit	76.500.000	Pengadaan Mebel	Kab. Jepara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46 Unit	76.500.000

2	'1 7	'0 1	2 0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	163.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	163.000.000
2	'1 7	'0 1	2 0 7	1 0 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	86.700.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	86.700.000
2	'1 7	'0 1	2 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	24 laporan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	24 laporan	
2	'1 7	'0 1	2 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	141.420.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	141.420.000
2	'1 7	'0 1	2 0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	534.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	534.600.000
2	'1 7	'0 1	2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	127 unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	127 unit	
2	'1 7	'0 1	2 0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jepara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	59.758.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jepara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	59.758.000
2	'1 7	'0 1	2 0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	345.916.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	345.916.500

							Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi		
2	'17	'01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100.000.000
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	38 %		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	38 %	
2	17	03	201		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pemuktahiran data koperasi	201 koperasi		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pemuktahiran data koperasi	201 koperasi	
2	17	03	201	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	201 koperasi	100.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	201 koperasi	125.000.000

2	1 7	0 4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi Sehat	76 %		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi Sehat	76 %	
2	1 7	0 4	2 0 1		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi Sehat	216 unit		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi Sehat	216 unit	
2	1 7	0 4	2 0 1	0 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	216 unit	100.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	216 unit	135.000.000
2	1 7	0 5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas	4,60 %		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas	4,60 %	
2	1 7	0 5	2 0 1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengurus, Pengawas, Pengelola dan anggota koperasi yang memahami pengetahuan koperasi	150 orang		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengurus, Pengawas, Pengelola dan anggota koperasi yang memahami pengetahuan koperasi	150 orang	
2	1 7	0 5	2 0 1	0 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Jepara	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 orang	462.727.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Jepara	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 orang	472.727.000
2	1 7	0 6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri	25 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri	25 %	

2	1 7	0 6	2 0 1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri	167 unit usaha		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri	167 unit usaha	
2	1 7	0 6	2 0 1	0	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	167 unit usaha	90.319.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	167 unit usaha	100.319.000
2	1 7	0 7			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	0,52 %		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	0,52 %	
2	1 7	0 7	2 0 1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan/		Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran	562 unit usaha		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan/		Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran	562 unit usaha	
2	1 7	0 7	2 0 1	0	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Jepara	Jumlah Unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen,	211 unit usaha	65.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Jepara	Jumlah Unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen,	211 unit usaha	65.000.000

							standarisasi, dan restrukturisasi usaha					standarisasi, dan restrukturisasi usaha		
2	1 7	0 7	2 . 0 1	0 2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Jepara	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	60 unit usaha	66.500.000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Jepara	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	60 unit usaha	66.500.000
2	1 7	0 7	2 . 0 1	0 3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Jepara	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	75 unit usaha	134.500.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Jepara	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	75 unit usaha	134.500.000
2	1 7	0 7	2 . 0 1	0 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Jepara	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	75 unit usaha	66.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Jepara	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	75 unit usaha	66.000.000
2	1 7	0 7	2 . 0 1	0 5	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Kab. Jepara	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	16 orang	19.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Kab. Jepara	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	16 orang	19.000.000
2	1 7	0 7	2 . 0 1	0 6	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan	Kab. Jepara	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	125 orang	114.000.000	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan	Kab. Jepara	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	125 orang	114.000.000
2	1 7	0 8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri	1,76 %		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri	1,76 %	
2	1 7	0 8	2 . 0 1		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Usaha mikro yang naik kelas	582 unit usaha		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Usaha mikro yang naik kelas	582 unit usaha	

2	1 7	8	2 . 0 1	0 1	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Jepara	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	582 unit usaha	1.271.511.000	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Jepara	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	582 unit usaha	1.630.111.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3	3 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
3	3 2	0 3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Rasio peningkatan jumlah transmigran	100 %		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Rasio peningkatan jumlah transmigran	100 %	
3	3 2	0 3	2 0 1		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah KK yang berangkat	2 KK		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah KK yang berangkat	2 KK	
3	3 2	0 3	2 0 1	0 1	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan Transmigrasi yang berasal dar 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.	Kab. Jepara	Jumlah laporan hasil koordinasi sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 daerah	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan Transmigrasi yang berasal dar 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.	Kab. Jepara	Jumlah laporan hasil koordinasi sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 daerah	1 Laporan	25.000.000
3	3 2	0 3	2 0 1	0 8	Pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi Teknis calon Transmigran Penduduk setempat	Kab. Jepara	Jumlah calon Transmigran yang terdaftar, terseleksi Administrasi dan teknis	2 KK	5.000.000	Pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi Teknis calon Transmigran Penduduk setempat	Kab. Jepara	Jumlah calon Transmigran yang terdaftar, terseleksi Administrasi dan teknis	2 KK	5.000.000
3	3 2	0 3	2 0 1	0 9	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Kab. Jepara	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan			Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Kab. Jepara	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	1 lokasi	40.000.000

3	3	0	2	1	Penyuluhan program transmigrasi kepad calon transmigran penduduk asal	Kab. Jepara	Jumlah calon transmigran penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan	2 orang	55.000.000	Penyuluhan program transmigrasi kepad calon transmigran penduduk asal	Kab. Jepara	Jumlah calon transmigran penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan	2 orang	55.000.000
3	3	0	2	1	Penampungan Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Transmigran yang ditampung di penampungan kabupatenDaerah asal	2 Kepala Keluarga	5.000.000	Penampungan Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Transmigran yang ditampung di penampungan kabupatenDaerah asal	2 Kepala Keluarga	5.000.000
3	3	0	2	1	Pendampingan dari kabupaten/kota sampai lokasi	Kab. Jepara	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan kabupaten/kota sampai ke lokasi	2 Kepala Keluarga	20.000.000	Pendampingan dari kabupaten/kota sampai lokasi	Kab. Jepara	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan kabupaten/kota sampai ke lokasi	2 Kepala Keluarga	20.000.000
					JUMLAH				11.489.104.000					12.237.704.000

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “top down & bottom up”. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Diantara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan. Usulan kegiatan untuk Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2023 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel II.5

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Jepara

Nama: Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi (Desa/Dukuh/RT/RW)	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Desa Kriyan, Kab. Jepara	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	1 paket	
		Desa Batukali rt 01 rw 02, Kab. Jepara		1 paket	
		Desa Jebol RT.07/RW.01 Kec. Mayong Kab. Jepara, Kab. Jepara		1 paket	
		Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Kab. Jepara		1 paket	
		Kelurahan Kauman, Kab. Jepara		1 paket	

2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Balai Desa - Desa Brantaksekarjati, Kab. Jepara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (dilatih soft skill untuk usaha mandiri dan usulan aspirasi (bidang Nakertrans) serta pelatihan di UPTD BLK	1 paket	
---	--	---	--	---------	--

Kedua usulan tersebut sesuai dengan tugas pokok Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 , serta merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2013-2018. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu : 1) membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI; 2) mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota; 3) memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan 4) menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Jepara Tahun 2005 – 2025 Pembangunan urusan Koperasi dan UMKM yaitu :

Pembangunan koperasi dan UKM diarahkan untuk mewujudkan koperasi dan UKM sebagai kelembagaan ekonomi kerakyatan yang menerapkan sistem pengelolaan usaha secara efisien, produktif, dan berdaya saing, mandiri dan mampu sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan keunggulan kompetitif bagi usaha kecil menengah. Adapun untuk Pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja serta membangun jiwa kewirausahaan. Sejalan dengan pengembangan bidang tenaga kerja, diarahkan pula untuk dilakukan pengembangan transmigrasi.

Dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan masih belum hilang di tahun 2021, kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran jangka pendek dalam satu tahun yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana-sarana Hubungan Industrial, dengan sasaran antara lain: Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja, Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha, Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan, dan Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi.

2. Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas, dengan sasaran yaitu: Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi dan Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

3.3 Program dan Kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah :

1. Pencapaian SDGs, dimana Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung pencapaian tujuan 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yg Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yg Produktif & Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua) dengan Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial, serta mendukung pencapaian tujuan 10 (Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara) dengan Program Penempatan Tenaga Kerja.
2. Pengentasan kemiskinan dengan Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
3. Pengentasan Pengangguran dengan Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dengan Program Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Mikro (UMKM), dan Program Pengembangan UMKM.
5. Pengembangan daerah terisolir dengan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
6. Pengembangan sumber daya lokal dengan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

Berdasarkan penelaahan Kebijakan umum, tujuan, sasaran dan bahan-bahan pertimbangan tersebut diusulkan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang kami susun dalam 11 program yang terdiri dari 25 kegiatan dan 64 sub kegiatan dengan kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp. 12.237.704.000,- terdiri dari Dana Alokasi

Umum (DAU) sebesar Rp. 7.905.340.000,-; Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 2.947.569.000,-; DAK Non Fisik sebesar Rp. 404.200.000,- dan DBHCHT sebesar Rp. 980.595.000,-. Adapun secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk tahun 2023 menurut rancangan awal RKPD adalah Rp. 11.489.104.000,-. Adanya perbedaan penganggaran antara rancangan awal RKPD dan menurut hasil analisis kebutuhan di karenakan adanya tambahan 2 sub kegiatan baru yaitu Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran serta adanya penambahan anggaran pada beberapa subkegiatan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19.

Program Kegiatan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 sebagaimana tersebut di bawah ini :

A. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan sub kegiatan:
 - a) *Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi*
2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan sub kegiatan:
 - a) *Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*
3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, dengan sub kegiatan:
 - a) *Penyediaan Sumber Daya Perizinan lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi*
4. Konsultasi Produktivitas pada perusahaan Kecil, dengan sub kegiatan:
 - a) *Pelaksanaan Konsultasi produktivitas kepada Perusahaan Kecil'*
5. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - a) *Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja*

B. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, dengan kegiatan:

1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) *Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja*
 - b) *Pelayanan Antar Kerja*
 - c) *Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja*
 - d) *Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan*
 - e) *Perluasan Kesempatan Kerja*
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan sub kegiatan:
 - a) *Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online*
 - b) *Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online*
 - c) *Job Fair/ Bursa Kerja*

3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) *Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia*
 - b) *Penyediaan Layanan Terpadu pada calon pekerja migran*
 - c) *Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan*
4. Penertiban Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) *Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota*

C. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, dengan kegiatan:

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu Daerah Kab./Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) *Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan*
 - b) *Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan*
 - c) *Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan*
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) *Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu Daerah Kabupaten/Kota*
 - b) *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu Daerah Kab./Kota*
 - c) *Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta non afiliasi*
 - d) *Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab./Kota*
 - e) *Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*

D. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- a) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
 - b) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
 - c) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
 - d) *Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD*
 - e) *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*
 - f) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
 - g) *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
 - b) *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
 - b) *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
 - c) *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
 - d) *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
 - e) *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
 - f) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) *Pengadaan Mebel*
 - b) *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - c) *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - b) *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - b) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
 - c) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

E. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI, dengan kegiatan:

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) *Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;*

F. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI, dengan kegiatan:

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) *Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota*

G. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN, dengan kegiatan:

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) *Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi*

H. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, dengan kegiatan:

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) *Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota*

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM), dengan kegiatan:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku, dengan sub kegiatan:
 - a) *Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro*
 - b) *Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro*
 - c) *Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro*
 - d) *Pemberdayaan Kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro*
 - e) *Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro*
 - f) *Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan*

J. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan sub kegiatan:
 - a) *Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi*

K. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, dengan kegiatan:

1. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) *Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*
 - b) *Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal*
 - c) *Penjajakan ke calon penempatan Transmigran*
 - d) *Penampungan Kab/kota*
 - e) *Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal*
 - f) *Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke lokasi*

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, lokasi dan kebutuhan pagu indikatif yang dibutuhkan dapat dilihat dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel III.1
Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024
Kabupaten Jepara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RencanaTahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		OPD Penanggun g jawab
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target CapaianK inerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang dilatih		2,7 %			2,7 %		
2	07	03	201		Pelaksanaan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi		376 orang			376 orang		
2	07	03	201	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (dilatih soft skill untuk usaha mandiri dan usulan aspirasi (bidang Nakertrans) serta pelatihan di UPTD BLK		376 orang	1.210.595.000		376 orang	1.470.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	03	202		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		24 lembaga			24 lembaga		

2	07	03	202	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		24 lembaga	15.000.000		24 lembaga	30.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	03	203		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		48 perizinan			48 perizinan		
2	07	03	203	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		48 perizinan	16.000.000		48 perizinan	30.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	03	204		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		4 perusahaan			4 perusahaan		
2	07	03	204	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		4 perusahaan	20.000.000		4 perusahaan	35.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	03	205		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah		4 dokumen			4 dokumen		
2	07	03	205	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah		4 dokumen	90.000.000		4 dokumen	100.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan		8,28			8,28		

2	07	04	201		Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD,dan perluasan Kesempatan kerja		7.540 orang			7.540 orang		
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi		60 Orang	14.700.000		60 Orang	35.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04	201	02	Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		7200 Orang	10.000.000		7200 Orang	35.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04	201	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		180 Orang	39.000.000		180 Orang	40.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		40 Orang	26.000.000		40 Orang	35.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04	201	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		60 Orang	86.060.000		60 Orang	105.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04	203		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem		20.000 orang			20.000 orang		

						Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)							
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		20.000 Dokumen	10.000.000		20.000 Dokumen	30.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)		20.000 Orang	17.981.500		20.000 Orang	30.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04	2.03	03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja		7.200 Orang	70.000.000		7.200 Orang	80.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04	204		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan		260 orang			260 orang		
2	07	04	204	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		80 Orang	15.000.000		80 Orang	35.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04	204	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		160 Orang	17.000.000		160 Orang	30.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04	204	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		20 Orang	25.470.000		20 Orang	35.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04	205		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA yang divalidasi pengesahan RPTKA Perpanjangan dengan lokasi kerja Kabupaten Jepara		94 Orang			94 Orang		

2	07	04	205	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA yang divalidasi pengesahan RPTKA Perpanjangan dengan lokasi kerja Kabupaten Jepara		94 orang	30.000.000		94 orang	45.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit		100 %			100 %		
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml Persh yg melaksanakan Pengesahan PP yg terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP Online		75 perusahaan			75 perusahaan		
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yg memiliki PP		75 perusahaan	38.000.000		75 perusahaan	40.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yg memiliki PKB		5 perusahaan	34.000.000		5 perusahaan	40.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jml Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, LKS Bipartit) dan Pekerja yg terdaftar sbgai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		135 laporan	60.000.000		135 laporan	60.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan		45 perkara			45 perkara		
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Jumlah Perselisihan yang dicegah		15 perkara	77.000.000		15 perkara	80.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara

					Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yg terselesaikan		30 perkara	27.000.000		30 perkara	30.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yg diverifikasi		56 Asosiasi dan SP/SB	28.000.000		56 Asosiasi dan SP/SB	30.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina		2 lembaga	100.000.000		2 lembaga	100.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		100 orang	11.000.000		100 orang	12.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH								
2	'17	'01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %			100 %		
2	'17	'01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		7 dokumen			7 dokumen		
2	'17	'01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	4.000.000		2 Dokumen	15.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara

2	'17	'01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2.000.000		1 Dokumen	10.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1.000.000		1 Dokumen	5.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1.000.000		1 Dokumen	5.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1.000.000		1 Dokumen	5.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	1.000.000		1 Dokumen	5.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	10.000.000		1 Dokumen	15.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara

2	'17	'01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun		2 dokumen			2 dokumen		
2	'17	'01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		54 Orang/bulan	5.093.762.000		54 Orang/bulan	6.200.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	137.840.000		1 Dokumen	155.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun		8 dokumen			8 dokumen		
2	'17	'01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		8 orang	30.000.000		8 orang	60.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		6 dokumen			6 dokumen		
2	'17	'01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	18.000.000		1 Paket	45.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	62.244.000		1 Paket	85.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	21.000.000		1 Paket	50.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara

2	'17	'01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	22.000.000		1 Paket	40.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	24.000.000		1 Paket	40.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	135.000.000		20 Laporan	175.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		72 unit			72 unit		
2	'17	'01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		46 Unit	76.500.000		46 Unit	100.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		23 Unit	163.000.000		23 Unit	180.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	86.700.000		3 Unit	100.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun		24 laporan			24 laporan		
2	'17	'01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	141.420.000		12 laporan	150.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara

2	'17	'01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	534.600.000		12 laporan	560.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		127 unit			127 unit		
2	'17	'01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		25 Unit	59.758.000		25 Unit	75.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	345.916.500		2 Unit	200.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100 Unit	100.000.000		100 Unit	150.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		38 %			38 %		

2	17	03	201		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemuktahiran data koperasi		201 koperasi			201 koperasi		
2	17	03	201	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		201 koperasi	125.000.000		201 koperasi	105.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat		76 %			76 %		
2	17	04	201		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat		216 unit			216 unit		
2	17	04	201	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		216 unit	135.000.000		216 unit	105.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas		4,60 %			4,60 %		
2	17	05	201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus, Pengawas, Pengelola dan anggota koperasi yang memahami pengetahuan koperasi		150 orang			150 orang		

2	17	05	201	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		150 orang	472.727.000		150 orang	470.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri		25 %			25 %		
2	17	06	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri		167 unit usaha			167 unit usaha		
2	17	06	201	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		167 unit usaha	100.319.000		167 unit usaha	95.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran		0,52 %			0,52 %		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan/	Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran		562 unit usaha			562 unit usaha		

2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha		211 unit usaha	65.000.000		211 unit usaha	75.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro		60 unit usaha	66.500.000		60 unit usaha	75.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan		75 unit usaha	134.500.000		75 unit usaha	135.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro		75 unit usaha	66.000.000		75 unit usaha	50.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro		16 orang	19.000.000		16 orang	20.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	07	2.01	06	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan		125 orang	114.000.000		125 orang	100.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase unit usaha yang		1,76 %			1,76 %		

						berkembang ke arah mandiri							
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha mikro yang naik kelas		582 unit usaha			582 unit usaha		
2	17	8	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi		582 unit usaha	1.630.111.000		582 unit usaha	680.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rasio peningkatan jumlah transmigran		100 %			100 %		
3	32	03	201		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang berangkat		2 KK			2 KK		
3	32	03	201	01	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan Transmigrasi yang berasal dar 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.	Jumlah laporan hasil koordinasi sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 daerah		1 Laporan	25.000.000		1 Laporan	15.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
3	32	03	201	08	Pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi Teknis calon Transmigran Penduduk setempat	Jumlah calon Transmigran yang terdaftar, terseleksi Administrasi dan teknis		2 KK	5.000.000		2 KK	3.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
3	32	03	201	09	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang		1 lokasi	40.000.000		1 lokasi	50.000.000	Diskopukm nakertrans

						Dilaksanakan Penjajakan							Kab. Jepara
3	32	03	201	10	Penyuluhan program transmigrasi kepad calon transmigran penduduk asal	Jumlah calon transmigran penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan		2 orang	55.000.000		2 orang	55.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
3	32	03	201	15	Penampungan Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang ditampung di penampungan kabupatenDaerah asal		2 Kepala Keluarga	5.000.000		2 Kepala Keluarga	15.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
3	32	03	201	18	Pendampingan dari kabpaten/kota sampai lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan kabupaten/kota sampai ke lokasi		2 Kepala Keluarga	20.000.000		2 Kepala Keluarga	35.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
TOTAL									12.237.704.000			13.038.500.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, lokasi dan kebutuhan pagu indikatif yang dibutuhkan dapat dilihat dalam tabel (terlampir)

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memegang peranan penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di daerah, Renja tahun 2023 pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara sangat berarti bila pelaksanaannya sesuai dengan target pencapaian baik anggaran maupun kinerja. Renja juga digunakan sebagai pengusulan anggaran dan kegiatan pada APBD Kabupaten, acuan dalam Penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2023, sebagai dasar penentuan prioritas kegiatan dan plafon APBD, juga digunakan pelaksanaan kegiatan tahunan perangkat daerah dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2023. Penyajian dokumen ini diharapkan dapat mencerminkan nuansa pemerataan pembangunan sesuai skala prioritas, dengan pengelolaan dan penanganan secara prioritas untuk mencapai hasil yang optimal sesuai anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan maupun kelompok masyarakat lainnya selain itu juga konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai program yang telah dirumuskan dalam Renja maupun pada Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Diharapkan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang merupakan salah satu dokumen pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah mampu mengarahkan kebijakan dan program yang pencapaiannya sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dan untuk mewujudkannya diperlukan dukungan dan peran serta/partisipasi masyarakat dari semua *stakeholder* dan atau semua pihak yang berkepentingan.

Diharapkan hasil pembangunan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat serta mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjaga efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan maka diperlukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara tahun 2023.

KEPALA DINAS KOPERASI,UKM,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN JEPARA



SAMIADJI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP.19690509 199102 1002